

BAB II

LITERATURE REVIEW

2.1 Penelitian Terdahulu

Pemaknaan identitas profesional jurnalis menjadi hal yang relevan untuk diteliti pada berbagai kajian jurnalisme seni budaya. Raemy (2020, p. 2) mengategorikan definisi identitas profesional jurnalis melalui perspektif ilmu sosial yang diperkenalkan Hutter (1992) yakni makro, meso, dan mikro. Pada perspektif makro, identitas ditentukan oleh karakteristik eksternal dalam kaitannya dengan konstruksi sosial atau publik. Mitrović & Milojević (2022, p. 59) memaparkan masyarakat memandang jurnalis sebagai profesi yang dihormati, dihargai, terpelajar, serba bisa, dan di sisi lain mendapat imbalan atas karyanya.

Pada jurnalisme seni budaya, Harries & Wahl-Jorgensen (2007, p. 635) memaknai identitas profesional jurnalis sebagai peran istimewa karena memerlukan pengetahuan dan kemampuan khusus untuk menginterpretasikan pesan seni budaya, berita seni budaya mendapat posisi yang eksklusif meski sulit dikemas menjadi agenda utama atau *hard news*, hubungan yang rumit dengan nilai objektivitas, dan perannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, identitas profesional jurnalis seni budaya menurut Skulte (2015, p. 42), dimaknai sebagai penjaga budaya, cita rasa, dan semangat yang tinggi.

Menurut Sjøvaag (2010) dan Ward (2006), identitas profesional dalam jurnalisme perlu menghormati kontrak sosial antara jurnalis dan publik (Raemy, 2020, p. 4). Kontrak sosial tersebut yakni janji jurnalis untuk bertindak dengan rasa tanggung jawab sebagai imbalan atas kebebasan dan kemandirian dalam melakukan pekerjaan. Namun, budaya jurnalistik berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pemaknaan mengenai apa itu jurnalisme yang baik, bagaimana kinerjanya, dan identitas profesional dalam jurnalisme bergantung pada sistem sosial di setiap wilayah.

Eksistensi jurnalis pada sistem sosial digambarkan Kristensen (2019 dalam Sharp & Vodanovic, 2022, p. 1802) bahwa jurnalisme seni budaya tidak hanya dipraktikkan oleh jurnalis, tetapi juga dapat dilakukan intelektual publik, pemikir kritis, akademisi, dan kolumnis budaya. Postema & Deuze (2020, p. 1309) memaparkan partisipasi masyarakat dalam siklus produksi jurnalistik membuat jurnalis berperan fleksibel sebagai kurator, penerjemah, interpreter, wirausaha, inovator, perancang, ataupun penutur cerita transmedia. Harries & Wahl-Jorgensen (2007, p. 624) menggambarkan bahwa peran fleksibel dapat membuat jurnalis seni lokal dan nasional, editor seni, dan kritikus lepas cenderung memaknai identitas profesionalnya bukan bagian dari jurnalisme, melainkan penulis atau pengulas yang terlibat dengan dunia seni dan elit.

Sayangnya, Hellman & Jaakola (2012) menunjukkan pemaknaan tersebut memangkas lapangan pekerjaan pelaku seni yang bekerja secara khusus sebagai kritikus atau pengulas seni. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan telah didominasi oleh jurnalis yang memiliki spesialisasi profesi di bidang seni budaya. Peran fleksibel jurnalis juga membuat media sulit menggeneralisasi praktik, pengalaman, dan persepsi jurnalis terhadap identitas profesionalnya. Di sisi lain, cara jurnalis memaknai identitas profesionalnya bergantung pada posisi seni budaya dalam hierarki media (Harries & Wahl-Jorgensen, 2007, p. 621).

Identitas profesional jurnalis seni budaya yang bergantung pada sistem media merupakan salah satu aspek identitas dalam perspektif meso. Identitas pada perspektif meso dapat terbentuk melalui konteks sistem sosial bangsa, identitas budaya, identitas etnis, ataupun perusahaan (Hutter, 1992 dalam Raemy, 2020, p. 2). Beberapa ahli teori memandang fenomena pada aspek meso sebagai kaburnya batasan jurnalisme budaya (Lüddemann, 2015, p. 74 dalam Skulte, 2015, p. 42). Hellman & Jaakola (2012, p. 784) menggambarkan fenomena ini sebagai benturan dua paradigma fundamental jurnalisme seni budaya yakni estetika dan jurnalistik.

Pada paradigma estetika, kritik berbasis opini yang menekankan konsep kebermaknaan menjadi dasar bekerja dalam jurnalisme seni budaya. Jurnalis yang kemudian disebut sebagai pengulas atau kritikus bertindak sebagai ahli yang

mampu menginterpretasikan pesan seni budaya kepada audiens, khususnya penikmat dan pelaku seni budaya, berdasarkan pengalaman, perasaan, dan pandangannya terhadap aktivitas yang diliput. Pada paradigma jurnalistik, nilai-nilai jurnalistik menjadi dasar bekerja ketika meliput aktivitas seni budaya. Jurnalis tetap berperan sebagai insan pers yang memahami bahwa tidak semua audiens datang dari kalangan penikmat atau pelaku seni budaya. Oleh karena itu, jurnalis mengedepankan objektivitas dengan mengumpulkan informasi langsung dari narasumber, bukan opini pribadi jurnalis (Hellman & Jaakola, 2012, p. 787).

Klein (2005 dalam Harries & Wahl-Jorgensen, 2007, p. 622) memaparkan perbedaan nilai-nilai profesional dasar bekerja kritikus dan jurnalis berdampak pada pandangan individu terhadap pengalaman, kekuatan, dan tantangan profesinya di industri media saat melakukan peliputan seni budaya. Identitas profesional jurnalis menjadi bergantung pada kemampuan dalam memediasi dan memberikan penilaian terhadap produk seni budaya. Hal ini menjadi kontradiksi bahwa jurnalis dengan keahlian khusus di bidang seni budaya juga dapat disebut sebagai kritikus yang cenderung subjektif, sementara jurnalis mengedepankan nilai objektivitas dalam melaksanakan pekerjaannya.

Skulte (2015, p. 49) menyatakan kehadiran paradigma estetika dan jurnalistik membawa praktik jurnalisme seni budaya bertentangan dengan nilai profesionalisme jurnalistik karena melemahkan prinsip objektivitas, netralitas, ketepatan, pemahaman, keadilan, dan keberagaman seorang jurnalis. Menurut Hanitzsch (2007 dalam Deuze, 2005 dalam Kristensen, 2019, p. 4), dinamika ini membuat jurnalis memainkan peran yang samar-samar seperti menjadi lebih aktif atau pasif, terlibat secara sosial atau tidak memihak sama sekali, bertindak lebih sebagai musuh atau lebih setia kepada penguasa, bekerja untuk kepentingan pasar atau publik, dan melayani konsumen atau warga negara. Deuze (2005 dalam Tunstall, 2001, p. 17 dalam Harries & Wahl-Jorgensen, 2007, p. 621) menggunakan istilah 'jurnalisme cair' untuk menggambarkan praktik jurnalistik yang semakin tidak memiliki ketegasan definisi dan batasan.

Identitas profesional jurnalis seni budaya pada perspektif meso menunjukkan stabilitas dan standarisasi perlu diterapkan media sehingga memperkuat praktik jurnalisme seni budaya. Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan apakah jurnalis memilih media dan bidang yang paling sesuai dengan nuraninya atau disosialisasikan ke dalam *status quo* media. Adapun, selain menyaring nilai dasar jurnalistik dan kontrak sosial pada perspektif makro, media perlu menguatkan faktor di tingkat mikro seperti kompetensi, keterampilan, dan sikap jurnalis.

Pada perspektif mikro, identitas profesional jurnalis merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan individu seperti karakter atau keunikan dan pengetahuan jurnalis (Raemy, 2020, p. 5). Keunikan tersebut mencakup kemampuan mendengarkan, bercerita melalui tulisan ataupun lisan, memiliki kreativitas dan pemahaman yang baik mengenai masyarakat, serta memenuhi tugas kerja secara efisien (Nygren & Stigbrand, 2014 dalam Raemy, 2020, p. 6). Sementara itu, pengetahuan pada konteks media merupakan kemampuan jurnalis dalam mengumpulkan sumber informasi dan pengalaman serta menginterpretasi dan menjelaskan. Pada jurnalisme seni budaya, karakter dan pengetahuan jurnalis dapat dilihat melalui cara merepresentasikan keragaman etnis, budaya, dan kaum minoritas ke dalam bentuk foto, video, lisan, ataupun tulisan (Deuze, 2005, p. 453).

Karakteristik dan pengetahuan jurnalis serta berita yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh sistem media. Jaakkola (2023, p. 1226) memaparkan ketidakpastian batasan profesional membuat pemilihan topik peliputan didasarkan pada asumsi ruang redaksi mengenai relevansi antara objek budaya yang akan diliput dengan masyarakat lokal dan seberapa besar potensi berita dalam menarik audiens. Konsentrasi media yang lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas membuat konsep budaya yang diberitakan fokus pada budaya populer (Jaakkola, 2015; Purhonen, 2019 dalam Jaakkola, 2023, p. 1227). Menurut Harries & Wahl-Jorgensen (2007, p. 628), teks populer atau budaya rendah seperti berita hiburan mengenai selebriti bukanlah bagian dari jurnalisme seni budaya.

Kuatnya konsumsi berita terhadap teks populer mengancam identitas profesional jurnalis budaya sebagai mediator budaya tinggi. Guna

mempertahankan kualitas berita seni budaya, Costera Meijer (2020 dalam Wenzel & Crittenden 2021; Jenkins & Graves 2019; 2022; Nyre & Maiden 2022 dalam Jaakkola, 2023, p. 1215), menyarankan profesionalisme jurnalis lebih diorientasikan pada daya tanggap audiens, edukasi mengenai budaya daerah, menceritakan kisah-kisah kelompok etnis, dan dekat dengan komunitas lokal sembari menghormati kompleksitas konsep budaya, sehingga terbangun hubungan saling percaya dan timbal balik antara media dengan kelompok masyarakat.

Identitas profesional jurnalis pada perspektif mikro juga bertanggung jawab untuk menyajikan informasi seni budaya, melampaui tujuan untuk sekadar mendidik dan menghibur publik. Dengan demikian, jurnalis tidak dapat sekadar memiliki pemahaman seni budaya secara umum, tetapi juga pengetahuan khusus dan rasa antusias, sehingga berita yang dihasilkan membuat publik merasakan manfaat seni budaya bagi kehidupannya. Di sisi lain, Harries & Wahl-Jorgensen (2007, p. 625) memaparkan pengetahuan khusus bukanlah suatu keharusan, melainkan keahlian untuk mendapatkan sumber adalah yang terpenting. Namun, jika jurnalis mengemas berita seni budaya hanya berdasarkan fakta dari sumber, ditambah nilai objektivitas yang perlu ditaati, hasil berita tidak maksimal dan seni budaya dipandang masyarakat sebagai pengetahuan yang kurang penting.

Identitas jurnalis seni budaya sebagai profesi yang berbeda dari jurnalis di bidang lain tidak hanya berkaitan dengan posisinya yang samar-samar di media, tetapi juga tantangan dalam mematuhi nilai profesional utama yakni objektivitas. McNair (1998, p. 65 dalam Harries & Wahl-Jorgensen, 2007, p. 630) menyatakan integritas jurnalis bergantung pada identitas profesionalnya sebagai penyampai kebenaran atau fakta. Jurnalis dan editor seni yang diwawancarai Harries & Wahl-Jorgensen (2007, p. 630) menyampaikan bahwa peliputan seni budaya perlu dilakukan secara objektif, tidak memihak, tidak mencetak opini, dan netral.

Bentuk berita yang objektif kemudian digambarkan Salgado & Strömbäck (2012 dalam Postema & Deuze, 2020, p. 1310) sebagai jurnalisme deskriptif, faktual, dan interpretatif yang bertujuan menemukan kebenaran di balik fakta yang dapat diverifikasi. Jurnalisme deskriptif secara umum diidentifikasi dengan

gaya bahasa polos, bersifat apa adanya, dan lugas yang menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan, sedangkan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ dapat menjadi pertanyaan lanjutan (Cmiel, 1990 dalam Postema & Deuze, 2020, p. 1310).

Harries & Wahl-Jorgensen (2007, p. 630) memaparkan pendapat bahwa praktik jurnalistik yang objektif menciptakan gaya presentasi yang gagal melibatkan khalayak karena dianggap membosankan dan tidak mampu menarik khalayak untuk memiliki minat pada seni budaya. Selain itu, jika jurnalis tidak memiliki opini dan selera seni budaya, berita yang dihasilkan tidak layak didengar ataupun dibaca, dalam hal ini mengarahkan praktik jurnalisme seni budaya menjadi cenderung subjektif. Pengaruh opini, selera, dan emosi jurnalis untuk meningkatkan perhatian publik menunjukkan bahwa kalimat dalam berita seharusnya lebih dari sekadar gaya bahasa polos yang faktual.

Wahl-Jorgensen (2013 dalam Kristensen, 2022, p. 17) mengungkapkan sebagian besar jurnalis yang memenangkan Penghargaan Pulitzer dari 1995 hingga 2011 mengonstruksikan berita dengan melibatkan unsur emosi yakni penceritaan yang dipersonalisasi, petunjuk anekdot, dan perspektif kemanusiaan. Di sisi lain, emosi menurut Stenvall (2008 dalam Kristensen, 2022, p. 17) tetap disimpulkan sebagai pengalaman subjektif karena ciri utamanya yang berkaitan dengan perasaan dan suasana hati. Hal ini menunjukkan bahwa dalam meliput peristiwa seni budaya, jurnalis tidak dapat lepas dari subjektivitas guna menyampaikan makna dan realitas sosial (Hellman & Jaakkola, 2012). Realitas tersebut kemudian dituangkan dalam jurnalisme sastra sehingga jurnalis dituntut untuk memiliki keterampilan merangkai kata.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, pemaknaan identitas profesional jurnalis dalam meliput peristiwa seni budaya selaras dengan lingkup penelitian penulis. Identitas profesional dilihat melalui perspektif makro yang berhubungan dengan masyarakat, meso yang berhubungan dengan sistem atau budaya media sebagai organisasi, dan mikro yang berkaitan dengan karakteristik serta pengetahuan individu. Riset-riset terdahulu banyak menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam.

Namun, penelitian hanya fokus mengeksplorasi praktik profesionalisme jurnalis seni budaya dan identitas profesional jurnalis secara umum. Dengan demikian, kurang mendalami bagaimana jurnalis di luar bidang seni budaya meliput peristiwa seni budaya. Penelitian terdahulu juga memaparkan fenomena di luar negeri dan belum mendalami bagaimana jurnalis memaknai identitas profesionalnya ketika meliput peristiwa seni budaya di Indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis mengeksplorasi pemaknaan jurnalis terhadap identitas profesionalnya ketika meliput peristiwa seni budaya di Indonesia. Penelitian diperlukan karena masih minimnya praktik jurnalis seni budaya di Indonesia, sehingga media menggabungkan bidang lain ke dalam berita seni budaya, yang memengaruhi pemaknaan jurnalis akan identitas profesionalnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkuat identitas profesional jurnalis dalam praktik peliputan seni budaya, guna melahirkan karya-karya jurnalistik yang lebih berkualitas, mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, dan berdampak pada kelestarian serta pemberdayaan seni budaya Indonesia.

2.2 Konsep yang Digunakan

2.2.1 Identitas Profesional Jurnalis

Praktik jurnalis seni budaya di Indonesia yang kurang memiliki ketegasan definisi dan kejelasan batasan memengaruhi jurnalis dalam memaknai identitas profesionalnya sehingga berdampak pada kinerja serta berita yang dihasilkan. Menurut Pratt (2006 dalam Raemy, 2020, p. 5), identitas profesional jurnalis merupakan ciri-ciri individu dengan kepribadian dan pengetahuan unik untuk mendapatkan otonomi dan prestise pada hierarki media. Keunikan tersebut mencakup kemampuan mendengarkan, bercerita melalui tulisan atau lisan, memiliki kreativitas dan pengetahuan yang baik mengenai masyarakat, serta memenuhi tugas kerja secara efisien (Nygren & Stigbrand, 2014 dalam Raemy, 2020, p. 6).

Raemy (2020, p. 2) memaparkan instrumen untuk mendefinisikan identitas profesional jurnalis melalui definisi identitas yang diperkenalkan Hutter (1992). Definisi identitas tersebut dikategorikan ke dalam tiga perspektif ilmu sosial yakni makro: Identitas ditentukan oleh karakteristik eksternal dalam kaitannya dengan identitas sosial atau publik; meso: Identitas dalam konteks sistem sosial seperti bangsa, identitas budaya, identitas etnis, dan perusahaan; dan mikro: Identitas sebagai proses refleksi diri di tengah pengalaman dan pengetahuan individu.

Konsep identitas profesional jurnalis diterapkan pada berbagai kajian jurnalistik, salah satunya penelitian Mitrović & Milojević (2022) dalam artikel jurnal berjudul *Professional Identity of Journalists Then and Now: A Perspective of Journalists from Southeast Serbia*. Penelitian tersebut mengeksplorasi pergeseran pemaknaan identitas profesional jurnalis di Serbia yang dipengaruhi konvergensi media. Mengutip Wolfgang Donsbach (2009), Mitrović & Milojević (2022) menggambarkan bahwa identitas profesional jurnalis dipandang sebagai mediator informasi objektif dan pelayan publik, sebagai komunikator profesional yang menciptakan opini publik dengan mengejar tujuan subjektif, atau sebagai pekerja industri media yang diberi upah untuk melaksanakan pekerjaannya (Donsbach, 2009 dalam Mitrović & Milojević, 2022, p. 54).

Berdasarkan gambaran pernyataan Wolfgang Donsbach (2009), identitas profesional jurnalis dapat terbentuk oleh panggilan dan kepentingan individu, pekerjaan dalam konteks organisasi, dan ideologi institusional dalam hubungannya dengan masyarakat (Raemy, 2020, p.17). Pada kajian jurnalisisme selama beberapa dekade, para ahli menunjukkan bahwa ideologi jurnalistik terus berkembang dan disempurnakan sehingga melahirkan nilai profesionalisme guna memperkuat identitas profesional jurnalis (Deuze, 2005, p. 444). Pemahaman akan identitas profesional membantu jurnalis beradaptasi pada perubahan dan tantangan di lapangan secara profesional (Aldridge dan Evetts, 2003 dalam Raemy, 2020, p.5).

Menurut Syamsiyah, Pawito, Muktiyo, & Hastjarjo (2022, p. 1690), profesionalisme jurnalis merupakan nilai yang meliputi bagaimana jurnalis mendefinisikan profesinya, apa pekerjaannya, dan apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan pekerjaannya. Widaningsih & Prananingrum (2017, p. 163) memaparkan jurnalis perlu berorientasi pada sembilan elemen jurnalisme Bill Kovach & Tom Rosenstiel (2003) agar dapat menjalankan fungsi sosial media massa secara profesional. Elemen-elemen jurnalisme tersebut yakni kebenaran, loyalitas kepada warga, disiplin verifikasi, independen terhadap pihak yang diliput, menjadi pemantau independen terhadap kekuasaan, menghadirkan forum untuk publik, membuat hal penting menjadi menarik, menjaga berita tetap proporsional dan komprehensif, dan memiliki nurani.

Golding & Elliott (1979), Merritt (1995), dan Kovach & Rosenstiel (2001) dalam Deuze (2005, p. 447) menyebutkan lima nilai ideal sebagai panduan jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Nilai tersebut terdiri dari pelayanan publik yang berarti bahwa jurnalis berperan sebagai pengawas atau *watchdogs* untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, nilai objektivitas agar jurnalis bersikap netral dan tidak memihak, nilai otonomi sebagai sifat jurnalis yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan pekerjaannya, nilai kecepatan agar jurnalis memberikan informasi secara aktual dan cepat, serta nilai etika yang berarti jurnalis perlu memiliki etika, validitas, dan legitimasi.

Di antara nilai-nilai profesional yang berlaku, objektivitas menjadi norma utama sebagai panduan jurnalis dalam melakukan penilaian berita, pemilihan sumber, dan penyusunan struktur berita secara profesional (Soloski, 1999, p. 311 dalam Harries & Wahl-Jorgensen, 2007, p. 620). Pada 1970-an, Tuchman menciptakan konsep bahwa objektivitas merupakan 'ritual strategis' sehingga integritas jurnalis dianggap berkurang ketika menuangkan emosi pada berita (Kristensen, 2022, p. 17), khususnya ketika meliput karya seni budaya yang mengandung emosi

seniman dan dituangkan dalam simbol sehingga membuka peluang bagi jurnalis untuk bersikap subjektif. Pandangan ini menunjukkan bahwa objektivitas adalah kunci identitas profesional jurnalis.

Menurut Deuze (2008, p. 112), identitas profesional jurnalis terdiri dari status dan perlindungan jurnalis oleh hukum, pedoman etika organisasi, anggaran, sumber pilihan, karakteristik pasar, rutinitas, dan praktik profesional media. Di Indonesia, konsep identitas profesional jurnalis tertuang dalam Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006. Ketetapan tersebut memuat 11 kode etik yang wajib ditaati jurnalis. Menurut Alwi Dahlan (Sobur, 2001, p. 95 dalam Widaningsih & Prananingrum, 2017, p. 165), kode etik jurnalistik berfungsi untuk melindungi jurnalis ketika melaksanakan pekerjaannya, melindungi masyarakat dari berita keliru oleh jurnalis yang kurang profesional, mendorong persaingan yang sehat antarjurnalis, mencegah kecurangan antarrekan kerja, dan mencegah manipulasi informasi dari narasumber

Jurnalis yang dalam profesinya mampu memengaruhi persepsi individu juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk memastikan tujuan-tujuan kebaikan dari aktivitas seni budaya dapat tercapai. Menurut Louis W. Hodges, jurnalis perlu memiliki sikap dasar berupa rasa tanggung jawab kepada penugasan, perusahaan, dan diri sendiri. Selain itu, sikap tidak arogan, mengutamakan akurasi, kecepatan, dan jujur terhadap kebenaran juga diperlukan. Jika tidak menanamkan sikap-sikap dasar, jurnalis akan terjerumus dalam tujuh dosa pers yang digagas Paul Johnson (1998) yaitu distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, mengganggu privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni benak atau pikiran anak, dan penyalahgunaan kekuasaan.

2.2.2 Jurnalisme Seni Budaya

Konsep seni budaya yang kompleks sehingga cenderung hanya menarik kalangan masyarakat tertentu, membuat media memperluas batasan profesional dengan menggabungkan bidang jurnalisme lain ke dalam berita seni budaya, sehingga berita dapat mengandung unsur politik hingga ekonomi (Kristensen, 2019, p. 4). Menurut Syamsiah (2018, p. 169), jurnalisme seni budaya merupakan praktik pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai aktivitas terkait seni, budaya, dan industri kreatif. Seni budaya merupakan salah satu bidang profesional jurnalistik yang secara khusus membahas kehidupan sosial sehari-hari hingga isu seni budaya, dari budaya yang dipahami secara sempit sebagai ekspresi estetika, hingga budaya yang dipandang lebih luas sebagai “keseluruhan cara hidup” (Williams, 1958 dalam Kristensen, 2019, p. 2).

Guna menghasilkan berita seni budaya yang membangkitkan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari komunitas sosial, jurnalis perlu memahami konsep seni budaya. Budaya pertama kali didefinisikan secara komprehensif oleh antropolog Inggris, Edward B. Tylor, yang menyatakan bahwa budaya merupakan keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, hukum, tradisi, adat istiadat, kebiasaan, dan kemampuan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat (Tomlinson, 2004, p. 33 dalam Büyükbaykal, 2016, p. 576). Menurut Skulte (2015, p. 39), budaya merupakan nilai, norma, tradisi, ritual, simbol, dan bahasa yang disepakati sebagai standar keseharian hidup kelompok sosial di suatu wilayah dan diteruskan kepada masyarakat melalui aktivitas kesenian.

Seni dalam bahasa Inggris yakni ‘*art*’ berasal dari kata Latin ‘*ars*’ yang berarti ‘pengaturan’ atau ‘mengatur’ (Keser, 2005, p. 291 dalam Büyükbaykal, 2016, p. 576). Seni merupakan instrumen budaya untuk menyampaikan pesan dan aturan mengenai cara hidup, berpikir, dan berperilaku manusia. Menurut Lukmana (2020), seni merupakan bagian dari komunikasi massa karena memiliki tujuan yang sama untuk

menyampaikan pesan sosial. Seni menjadi salah satu produk komunikasi yang paling kreatif karena melibatkan imajinasi, estetika, bakat, dan ekspresi bermakna yang mampu membentuk cara pandang manusia terhadap dunia (Tanilli, 2006, p. 206 dalam Büyükbaykal, 2016, p. 576).

Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar mengategorikan aktivitas kesenian di Indonesia menjadi seni musik: alat musik dan lagu; gerak: tari; sastra: puisi dan kaligrafi; rupa: lukis, patung, dan kerajinan tangan; dan teater: drama musikal dan wayang. Aktivitas kesenian di Indonesia dalam sejarahnya berfungsi sebagai ritual kesuburan tanah, penangkal roh jahat, perkawinan, kelahiran, dan kematian. Seiring kemajuan zaman, medium untuk menyampaikan pesan budaya berkembang ke dalam industri kreatif seperti film, fotografi, desain, komik, arsitektur, dan *videogame* (Postema & Deuze, 2020, p. 1306). Dengan demikian, seni budaya merupakan konsep yang eksistensinya selalu ada dan berkembang di setiap periode manusia.

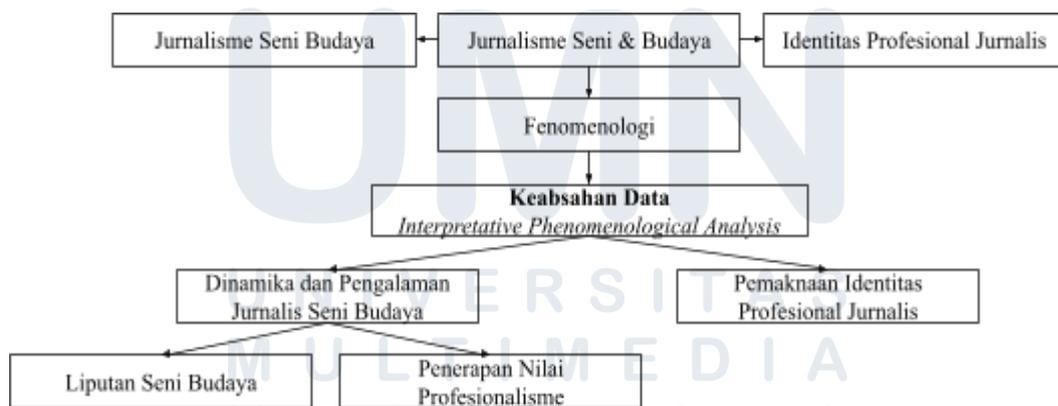
Nilai budaya di Indonesia tercermin melalui Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan persatuan dalam keberagaman masyarakat. Namun, nilai-nilai yang dianut juga dapat menimbulkan berbagai dinamika sosial seperti konflik antarsuku atau agama hingga konflik masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak selaras dengan budaya bangsa. Oleh karena itu, praktik jurnalistik yang secara khusus meliput peristiwa seni budaya diperlukan sebagai mediator pembawa damai. Jurnalisme seni budaya dalam praktiknya menyusun gambaran mengenai realitas sosial, menguraikan perspektif dari suatu fenomena, menawarkan solusi untuk isu-isu tertentu, mempromosikan nilai-nilai, dan dengan demikian mereproduksi bidang seni budaya itu sendiri (Tugarev, 2018, p. 153).

Aktivitas seni budaya sebagai bukti peradaban manusia membuat bidang jurnalistik ini tidak mudah dipraktikkan sebab jurnalis dituntut memiliki pengetahuan luas dalam bidang dasar seperti sejarah seni, seni rupa, arkeologi, antropologi, dan sosiologi (Büyükbaykal, 2016, p. 580).

Selain itu, sifat karya seni budaya yang multitafsir membuat setiap jurnalis dapat memberikan pemaknaan yang berbeda-beda. Jika gagal memberi interpretasi yang tepat, jurnalis justru menjadi sarana yang dapat memprovokasi situasi (Amirudin, 2018, p. 94).

Jurnalis dalam aktivitas seni budaya berperan untuk mengedukasi dan membentuk persepsi yang sehat, tidak hanya kepada penikmat dan pelaku seni budaya, tetapi membawa seluruh lapisan masyarakat untuk memahami seni budaya sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan sosial (Tugarev, 2018, p. 153). Melalui peliputan seni budaya, jurnalis mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas dan pendidikan seni budaya sehingga berdampak pada pembentukan kebijakan-kebijakan yang memastikan pemberdayaan seniman, perlindungan warisan seni budaya, dan keberlanjutan aktivitas seni budaya, khususnya di Indonesia sebagai bangsa yang multikultural (Büyükbaykal, 2016, p. 581).

2.3 Alur Penelitian



Tabel 2.3 Alur Penelitian

Sumber: Olahan Penulis